

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang dan statistik. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Saat ini kita sedang membangun dan menerapkan agenda Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang pelaksanaannya diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta petunjuk pelaksanaannya yang lebih dikonkritkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penilaian Reformasi Birokrasi tersebut.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara Self Assesment oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat

diartikan instansi pemerintah tersebut melakukan tahap-tahap dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian hingga menyampaikan Pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi.

Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah, diarahkan agar setiap instansi pemerintah dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh, yang meliputi :

1. Menerapkan perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan yang berorientasi outcome dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur;
2. Merencanakan anggaran berdasarkan pada rencana tingkat capaian kinerja yang telah direncanakan dalam rencana jangka menengah dan tahunan (RPJMN, Renstra dan Rencana Kerja) secara efektif dan efisien;
3. Mengukur capaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan secara konsisten, berkala dan tahunan serta melaporkan hasil pengukuran kinerjanya secara jujur dan tepat waktu dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
4. Melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2 Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka dilakukan penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan sejumlah sasaran strategis yang telah disepakati bersama. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dirumuskan sejumlah indikator kinerja utama. Perumusan indikator kinerja utama

tersebut berpedoman pada RPJMD dan RKPD Bappeda. Hasil capaian kinerja Bappeda Tahun 2015 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja, dibandingkan dengan target dari indikator kinerja utama. Hasil dari capain kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Prosentase Penjabaran RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	%	100 %	100 %	100%	Sangat tinggi
		Prosentase kesepakatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah	%	100 %	100 %	100%	Sangat tinggi
2.	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah	12 laporan (100 %)	12 laporan (100 %)	100 %	Sangat tinggi
3	Terlaksananya fungsi dan kebijakan RTRW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Prosentase digunakannya RTRW Kabupaten sebagai acuan dalam setiap perencanaan program pembangunan daerah	%	100 %	100 %	100 %	Sangat tinggi

4	Tersedianya data-dat statistik dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil penelitian an dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah	%	10 dokum en/ laporan	8 doku men/la poran	80 %	tinggi
		Prosentase Jumlah data-data Statistik yang akurat dan tepat waktu	%	80 %	80 %	100 %	Sangat tinggi
5	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana	Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	%	80 %	70 %	87,50 %	Tinggi
6	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia	Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja	%	90 %	80 %	88,90 %	Sangat tinggi
7	Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan keuangan	Prosentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	%	90 %	80 %	88,89 %	Tinggi

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran satu mempunyai satu indikator kinerja utama, yaitu Prosentase Penjabaran RPJMD Kabupaten Hulu

Sungai Utara Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Realisasi capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
Prosentase Penjabaran RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD	%	100	100	100	100	-	-

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase realisasi dari indikator kinerja utama di atas diperoleh dari: “

Prosentase Jumlah implementasi program pada penjabaran RPJMD Kab.HSU tahun 2013-2017 ke dalam RKPD tahun 2015 x 100 %.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
Jumlah laporan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jml	62 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	-	-
Prosentase digunakannya RTRW Kabupaten sebagai acuan dalam setiap perencanaan program pembangunan daerah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
Jumlah laporan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah	Jml	60 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	8 Dokumen	-	-
Prosentase jumlah data-data statistik yang akurat dan tepat waktu	%	100 %	100 %	80 %	100 %	-	-

Realisasi Capaian Program Kegiatan Bappeda Berdasarkan PK Tahun 2015 yang Mendukung Sasaran Konsistensi antara sasaran program dan/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang disusun sebelumnya

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target	Realisasi	
				fisik	%
Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah					
1. Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Sebagai bahan evaluasi, pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah Kab. HSU	198.945.000,-	3 dokum en	3 doku men	100 %
2. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	99.890.000,-	3 dokum en	3 doku men	100 %
3. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB	Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	103.708.000,-	3 dokum en	3 doku men	100 %
Program Perencanaan Tata Ruang					
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan - Rencana Rinci Kawasan Pertanian Kab. HSU	Tersedianya RDTR Kawasan Strategis Pertanian	250.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
2. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan - Analisis fisik wilayah Kab. HSU	Tersedianya data dan analisis fisik wilayah Kab. HSU	100.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
- Study kelayakan kawasan pengembangan kota Amuntai	Tersedianya data dan analisis fisik wilayah Kab. HSU	50.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
1. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh - Masterplan kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) Kab. HSU	Tersedianya masterplan kawasan strategis dan cepat tumbuh Kab. HSU	200.00.000,-	1 paket	1 paket	100 %

Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Pengadaan komputer mainframe/server	Tersedianya rumusan rencana pembangunan Daerah	100.000.000,-	1 set	1 set	100 %
- Pengadaan Jaringan Komputer	Tersedianya rumusan rencana pembangunan Daerah	50.000.000,-	1 set	1 set	100 %
Program Perencanaan Pembangunan ekonomi					
1. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah - Optimalisasi sumber daya dan kearifan lokal untuk pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan	Tersusunnya rencana pembangunan bidang ekonomi	50.000.000,-	1 Paket	1 paket	100 %
- Strategi peningkatan, pengembangan dan pengelolaan hasil perikanan Kab. HSU	Tersusunnya rencana pembangunan bidang ekonomi	50.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
- Strategi pengembangan agroindustri di Kab. HSU	Tersusunnya rencana pembangunan bidang ekonomi	132.000.000,-	1 paket	0	0
2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - Analisa Mikro Ekonomi Kab. HSU	Sebagai bahan perumusan perencanaan bidang ekonomi	50.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
- Database inventarisasi Koperasi dan UMKM	Sebagai bahan perumusan perencanaan bidang ekonomi	50.000.000,-	1 paket	1 paket	100 %
Program Sosial dan Budaya					
1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya - Laporan tahunan bidang sosial budaya	Meningkatnya kualitas dan terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya	199.632.000,-	1 laporan	1 laporan	100 %
2. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan - Laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Terkoordinasinya dan terlaksananya fasilitasi perencanaan penanggulangan kemiskinan	319.453.000,-	1 laporan	1 laporan	100 %

Program Penelitian dan Pengembangan					
1. Kajian-kajian pembangunan - Penyusunan kajian kemiskinan di Kab. HSU	Sebagai bahan perumusan perencanaan pembangunan	100.000.000,-	1 Paket	1 paket	100 %
- Pengembangan Potensi Wisata di Kab. HSU	Sebagai Bahan Perumusan Perencanaan Pembangunan	162.500.000,-	1 Paket	1 paket	100 %
- Penyusunan kajian potensi ternak lebah di Kab. HSU	Sebagai Bahan Perumusan Perencanaan Pembangunan	50.000.000,-	1 Paket	1 paket	100 %

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun Anggaran 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 9.406.955.500,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 6.671.541.500,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.735.414.000,00, melalui mekanisme perubahan APBD 2015 menjadi Rp. 9.276.955.500,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 6.671.541.500,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.605.414.000,00.

Total Realisasi APBD Tahun 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 7.332.436.785,00 (79,04 %) dengan rincian untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.189.643.159,00 (77,79 %) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.142.795.626,00 (82,24 %)

TABEL 3
Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Pagu (Rp).	Realisasi (Rp).	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Tidak Langsung	2.605.414.000,00	2.142.795.626,00	82,24
	- Belanja Pegawai	2.605.414.000,00	2.142.795.626,00	82,24
2.	Belanja Langsung	6.671.541.500,00	5.189.643.159,00	77,79
	- Belanja Pegawai	1.477.220.000,00	1.386.945.000,00	93,89
	- Belanja Barang dan Jasa	3.078.936.500,00	2.060.264.493,00	66,91
	- Belanja Modal	2.115.385.000,00	1.742.433.666,00	82,37
	Jumlah	9.276.955.500,00	7.332.438.785,00	79,04